

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HOPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjelaskan beberapa teori, hasil penelitian terdahulu dan publikasi umum yang relevan dengan variabel-variabel penelitian. Adapun kajian pustaka yang dikemukakan adalah sebagai berikut.

2.1.1 Public Finance Theory

Public Finance Theory dijadikan sebagai landasan teori untuk variabel independen dalam penelitian ini, yaitu kondisi keuangan karena memiliki keterkaitan yang kuat dalam menjelaskan hubungan antara kondisi keuangan dan Livability. Teori ini diperkenalkan oleh Richard A. Musgrave, yang dikenal sebagai Bapak Keuangan Publik Modern, melalui karyanya sejak tahun 1959 yang membahas bagaimana pemerintah mengelola dan mendistribusikan sumber daya keuangan untuk menjawab kebutuhan sosial secara efisien dan adil.

Dalam teori ini, pemerintah berperan sebagai penyedia berbagai barang dan jasa publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta layanan sosial lain yang esensial bagi masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kondisi keuangannya sangat berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik tersebut.

Public Finance Theory memberikan pemahaman bahwa pengelolaan keuangan publik yang baik memungkinkan pemerintah menjalankan fungsi alokatif, distribusi, dan stabilitas secara efektif. Hal ini berhubungan langsung.

2.1.1.1 Pengertian Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan pemerintah kota merupakan gambaran menyeluruh mengenai kapasitas suatu daerah dalam memenuhi kewajiban fiskalnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta dalam menyediakan layanan publik secara berkelanjutan (Wang et al., 2007). Kondisi ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan, belanja, dan pengelolaan utang, sehingga dapat mendukung efektivitas pelayanan publik serta keberhasilan program pembangunan daerah (Sohl et al., 2009).

Kondisi keuangan yang sehat menunjukkan adanya stabilitas fiskal yang memungkinkan pemerintah daerah untuk tetap mempertahankan layanan dasar dan melaksanakan program prioritas, bahkan ketika menghadapi tekanan ekonomi atau penurunan pendapatan. Stabilitas ini tercapai melalui pengelolaan sumber daya keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel, yang pada gilirannya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah (García- Sánchez, I.M.; Cuadrado-Ballesteros, B.; Frías-Aceituno, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, kondisi keuangan adalah gambaran menyeluruh mengenai kapasitas pemerintah kota dalam memenuhi kewajiban fiskalnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta dalam menyediakan layanan publik secara berkelanjutan dan merata. Kondisi ini mencerminkan stabilitas dan kesehatan fiskal daerah, yang ditentukan oleh kemampuan mengelola pendapatan, belanja, dan utang secara seimbang, responsif, dan efisien. Pemerintah daerah dengan kondisi keuangan yang sehat mampu merespons kebutuhan masyarakat secara optimal, menjalankan pembangunan secara efektif, serta meningkatkan

kesejahteraan melalui pelayanan publik yang berkualitas (Wang et al., 2007; Sohl et al., 2009; García-Sánchez et al., 2022).

2.1.1.2 Fungsi dan Peran Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan memiliki peran strategis dalam memastikan pemerintah kota mampu terus menyediakan layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, bahkan ketika terjadi fluktuasi pendapatan atau tekanan fiskal. Pemerintah dengan kondisi keuangan yang sehat dapat menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, serta merencanakan pengeluaran secara berkelanjutan untuk mendukung tujuan pembangunan jangka panjang (Cabaleiro et al., 2013).

Selain itu, kondisi keuangan berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja fiskal daerah melalui analisis indikator keuangan seperti surplus operasional, rasio utang terhadap aset, dan cadangan kas. Analisis ini membantu mengidentifikasi potensi risiko fiskal dan menjadi mekanisme early warning system yang dapat mencegah penurunan kinerja keuangan di masa mendatang (Handoyo et al., 2019).

Secara lebih luas, kondisi keuangan juga berperan dalam memperkuat kapasitas adaptif pemerintah daerah untuk merespons dinamika kebutuhan masyarakat dan perubahan kondisi ekonomi. Pemerintah yang memiliki kondisi keuangan yang solid lebih mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan publik, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memastikan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel (X. H. (2018; Yap, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, fungsi dan peran kondisi keuangan tidak hanya memastikan keberlanjutan penyediaan layanan publik, tetapi juga memberikan

dasar evaluasi fiskal yang mencegah risiko keuangan, serta mendukung kemampuan adaptif pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat (Cabaleiro et al., 2013; Handoyo et al., 2019; X. H. (2018; Yap, 2018).

2.1.1.3 Indikator Kondisi Keuangan

Penilaian terhadap kondisi keuangan pemerintah kota dalam penelitian ini mengacu pada lima indikator utama yang diusulkan Ritonga & Buanaputra (2022). Indikator-indikator ini dirancang untuk mencerminkan kapasitas fiskal suatu secara efektif dan efisien. Kelima indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas Operasional

Kapasitas operasional adalah kemampuan teknis dan administratif pemerintah kota dalam menyediakan sumber daya, mengelola sistem, dan menjalankan proses internal yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan dan program pelayanan publik secara efektif. Kapasitas ini mencerminkan seberapa jauh organisasi publik mampu menjaga kelangsungan kegiatan operasional dengan dukungan anggaran, SDM, dan mekanisme kerja yang terstruktur.

Kapasitas operasional mencakup usaha pemerintah untuk menjamin tersedianya sumber daya finansial, manusia, dan administratif yang diperlukan agar kebijakan publik dapat dijalankan secara sukses dan berkelanjutan. Di tingkat organisasi, hal ini juga mencakup koordinasi internal dan pengelolaan kinerja yang akuntabel (Choi, 2021).

Kapasitas operasional adalah kemampuan pemerintah lokal dalam mengubah input yang tersedia menjadi layanan publik nyata, termasuk

dalam hal pembiayaan kegiatan rutin tanpa ketergantungan berlebih pada transfer eksternal. Pemerintah dengan kapasitas operasional yang baik cenderung lebih mandiri dan berdaya tahan secara fiskal (Assefa et al., 2014).

Kapasitas operasional adalah kemampuan entitas pemerintah dalam mempertahankan fungsi dan layanan dasarnya dari waktu ke waktu, termasuk dalam situasi ketidakpastian fiskal. Kapasitas ini dipengaruhi oleh stabilitas pendapatan, kemampuan mengelola anggaran rutin, serta efisiensi struktur biaya operasional (Fragnière et al., 2010).

Berdasarkan uraian di atas, Kapasitas operasional adalah kemampuan teknis, administratif, dan fiskal pemerintah daerah dalam menjamin kelangsungan pelaksanaan kebijakan dan program pelayanan publik secara efektif dan berkelanjutan. Kemampuan ini mencakup penyediaan sumber daya manusia, keuangan, dan sistem kerja yang memadai untuk mendukung operasional harian, serta mencerminkan seberapa jauh organisasi publik mampu mengelola input menjadi layanan nyata tanpa ketergantungan berlebih pada bantuan eksternal. Kapasitas ini juga melibatkan koordinasi internal, efisiensi biaya, serta ketahanan fiskal dalam menghadapi tekanan anggaran atau ketidakpastian ekonomi. Pemerintah daerah dengan kapasitas operasional yang kuat menunjukkan kemandirian dalam pengelolaan pelayanan dasar serta mampu menjaga kualitas layanan meskipun dalam kondisi fiskal yang menantang (Choi, 2021; Assefa et al., 2014; Fragnière et al., 2010).

Indikator kapasitas operasional dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kapasitas operasional} = \frac{\text{Surplus / Defisit Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

2. Fleksibilitas Fiskal

Fleksibilitas fiskal adalah kemampuan pemerintah kota untuk menyesuaikan struktur pendapatan dan belanja dalam merespons dinamika kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan yang berubah. Daerah dengan fleksibilitas fiskal yang tinggi memiliki ruang kebijakan yang lebih luas karena tidak terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, yang tercermin dari proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah (OECD, 2021).

Konsep ini juga mencakup potensi daerah untuk merealokasi anggaran internal sebagai respons terhadap perubahan pendapatan atau kebutuhan mendesak, tanpa menimbulkan defisit struktural (Nakatani, 2025).

Fleksibilitas fiskal adalah kapasitas daerah dalam menentukan arah belanja tanpa terkunci oleh kewajiban belanja wajib, sehingga mendukung otonomi fiskal secara nyata (Blöchliger dan Petzold, 2009, dalam Ritonga & Buanaputra, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, Fleksibilitas fiskal dapat disimpulkan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk secara mandiri dan adaptif mengelola struktur pendapatan dan belanja, termasuk merealisasikan anggaran dalam merespons perubahan kebutuhan dan kondisi fiskal tanpa menimbulkan defisit struktural. Fleksibilitas ini mencerminkan tingkat

kemandirian fiskal suatu daerah, terutama melalui proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, serta kebebasan dalam pengambilan keputusan anggaran tanpa terikat pada belanja wajib (OECD, 2021; Nakatani, 2025; Blöchliger & Petzold dalam Ritonga & Buanaputra, 2022).

Indikator fleksibilitas fiskal dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Fleksibilitas Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Operasional} - \text{Belanja Pegawai}}{\text{Pendapatan Total}}$$

3. Komitmen Mempertahankan Layanan

Komitmen adalah dari upaya pemerintah dalam menjaga rasio belanja operasional untuk pelayanan esensial meskipun berada dalam tekanan fiskal atau kondisi krisis ekonomi (Suhadi et al., 2022).

Selain itu, komitmen fiskal yang kuat ditunjukkan oleh daerah yang tetap memprioritaskan belanja pelayanan dasar bahkan ketika menghadapi ketidakpastian ekonomi, karena keberlanjutan pelayanan publik merupakan fondasi utama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal (Andrews & Shah, 2005).

Berdasarkan uraian di atas, komitmen mempertahankan layanan adalah kemampuan dan kemauan pemerintah daerah untuk secara konsisten menjaga keberlangsungan pelayanan publik dasar di sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, meskipun berada dalam tekanan fiskal atau ketidakpastian ekonomi. Komitmen ini tercermin dari konsistensi alokasi anggaran pada belanja operasional layanan esensial,

yang menunjukkan orientasi jangka panjang pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat serta menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah (OECD, 2021; Suhadi et al; Andrews & Shah, 2005).

Indikator Komitmen untuk mempertahankan layanan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Komitmen Mempertahankan Layanan} = \frac{\text{Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

4. Komitmen Meningkatkan Layanan

Komitmen meningkatkan layanan adalah orientasi manajerial jangka panjang dari pemerintah lokal dalam hal peningkatan mutu pelayanan dan responsivitas terhadap tuntutan warga. Ini melibatkan penggunaan indikator kinerja, evaluasi kebutuhan masyarakat, serta pengalokasian sumber daya untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan (Normi, 2017).

Komitmen peningkatan layanan terlihat dari strategi fiskal proaktif, di mana pemerintah tidak hanya mempertahankan pelayanan yang ada, tetapi juga melakukan ekspansi dan peningkatan kualitas layanan berdasarkan evaluasi kinerja dan umpan balik masyarakat. Fokusnya adalah pada continuous improvement dalam sistem pelayanan publik, termasuk investasi pada kapasitas SDM dan infrastruktur (Downe et al., 2010).

Berdasarkan uraian di atas, komitmen meningkatkan layanan adalah bentuk kesungguhan jangka panjang pemerintah daerah dalam memperluas cakupan, meningkatkan mutu, dan memperkuat efektivitas pelayanan publik

secara berkelanjutan. Komitmen ini tidak terbatas pada alokasi anggaran yang lebih besar, tetapi juga mencakup inovasi kebijakan, pemanfaatan teknologi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta reformasi kelembagaan yang responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah yang memiliki komitmen peningkatan layanan akan secara aktif melakukan evaluasi kinerja, melibatkan umpan balik publik, dan menggunakan indikator layanan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk menciptakan pelayanan yang lebih adaptif, efisien, dan partisipatif (Taupik et al., 2022; Downe et al., 2010; Normi, 2017).

Indikator komitmen meningkatkan layanan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Komitmen Meningkatkan Layanan} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

5. Kapasitas Melayani Masyarakat

Kapasitas melayani masyarakat merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya fiskal, administratif, dan manusia secara optimal guna menyediakan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan berkelanjutan. Kapasitas ini mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu menerjemahkan sumber daya menjadi output layanan yang sesuai dengan kebutuhan warga secara tepat waktu dan berkualitas. Kapasitas pelayanan publik daerah dapat diukur dari aspek operasional, analitis, dan politik. Ketiga aspek ini saling berkaitan dalam menentukan sejauh mana pemerintah daerah mampu merancang, mengimplementasikan, dan

mempertahankan program layanan publik secara efisien (Saimima & Suhardan, 2020).

Kualitas organisasi, terutama dari segi sumber daya manusia dan struktur kelembagaan, merupakan faktor utama dalam mendukung keberhasilan penyediaan layanan publik. Pemerintah dengan kapasitas manajerial yang baik cenderung lebih mampu menyerap anggaran dan menghasilkan layanan yang berkualitas (Gogalis, 2023).

Kapasitas pelayanan juga bergantung pada kemampuan koordinasi antar- lembaga dan lintas level pemerintahan. Pelayanan publik yang efektif tidak hanya bergantung pada kapasitas internal, tetapi juga pada kemampuan berkolaborasi dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi (Setiawan et al., 2022).

Berdasarkan uraian di atas, kapasitas untuk melayani masyarakat adalah kemampuan menyeluruh pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya fiskal, administratif, dan manusia secara strategis guna menghasilkan pelayanan publik yang responsif, efektif, dan berkelanjutan. Kapasitas ini tidak hanya bergantung pada aspek teknis internal seperti kualitas sumber daya manusia dan struktur kelembagaan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam merancang kebijakan berbasis analisis, mempertahankan pelaksanaan program melalui kekuatan politik lokal, serta membangun koordinasi yang solid dengan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Dengan demikian, kapasitas pelayanan publik mencerminkan kesanggupan

pemerintah daerah untuk mengonversi potensi yang dimiliki menjadi layanan yang bermakna dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat (Saimima & Suhardan, 2020; Gogalis, 2023; Setiawan et al., 2022).

Indikator Kapasitas Melayani Masyarakat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Kapasitas Melayani Masyarakat} = \frac{\text{Total Aset}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Kelima indikator tersebut secara bersama-sama memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan pemerintah kota. Kapasitas operasional dan fleksibilitas fiskal mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja untuk mempertahankan layanan rutin, sementara komitmen mempertahankan layanan dan komitmen meningkatkan layanan menunjukkan orientasi pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, kapasitas melayani masyarakat menggambarkan potensi aset yang dimiliki untuk mendukung penyediaan layanan bagi seluruh penduduk. Dengan demikian, kelima indikator ini saling melengkapi dalam menilai stabilitas, kemandirian, dan keberlanjutan fiskal pemerintah kota (Ritonga & Buanaputra, 2022).

Kondisi keuangan yang sehat pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini juga mengkaji Livability atau kelayakhunian kota sebagai variabel dependen,

yang mencerminkan sejauh mana lingkungan perkotaan mendukung kehidupan yang aman, nyaman, sehat, dan layak bagi seluruh warganya.

2.1.2 Livability

2.1.2.1 Pengertian Livability

Secara umum, istilah Livability digunakan untuk menggambarkan sejauh mana suatu kota mampu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, sehat, dan layak huni bagi seluruh warganya. Konsep ini mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas hidup penduduk, baik dari sisi fisik, sosial, maupun ekonomi.

Livability merupakan konsep yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kota mampu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, sehat, dan layak huni bagi seluruh warganya. Konsep ini tidak hanya mencakup aspek fisik seperti kualitas infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi seperti akses terhadap layanan publik, kesempatan kerja, serta keamanan dan partisipasi warga dalam kehidupan kota (Appleyard et al., 2014).

Livability merupakan cerminan sejauh mana suatu lingkungan mendukung kehidupan yang baik bagi individu, baik dalam memenuhi kebutuhan dasar maupun dalam mendukung perkembangan pribadi. Selanjutnya, kualitas lingkungan perkotaan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, sehingga Livability menjadi cerminan dari kualitas hidup secara menyeluruh (Pacione, 2003).

Dalam perspektif lain, Livability juga dipahami sebagai atribut lingkungan perkotaan yang berkontribusi terhadap kesejahteraan penduduknya, termasuk aspek keselamatan, kualitas lingkungan, layanan publik, dan aksesibilitas (Elsawy et al., 2019).

Berdasarkan definisi-definisi di atas, Livability adalah konsep multidimensi yang menggambarkan sejauh mana suatu kota mampu menyediakan lingkungan yang mendukung kehidupan yang aman, nyaman, sehat, dan layak bagi warganya. Konsep ini mencakup kombinasi antara faktor fisik seperti kualitas infrastruktur dan lingkungan, serta faktor sosial dan ekonomi seperti akses terhadap layanan publik, kesempatan kerja, keamanan, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan kota. Livability juga mencerminkan kualitas hidup secara keseluruhan karena mengaitkan pemenuhan kebutuhan dasar dengan potensi perkembangan individu dalam lingkungan yang mendukung kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, Livability menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu kota dalam menciptakan ruang hidup yang manusiawi dan berkelanjutan (Appleyard et al., 2014; Pacione, 2003; Elsaywy et al., 2019).

2.1.2.2 Prinsip Livable City

Menurut Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) dalam Most Livable City Index (MLCI) tahun 2022, prinsip livable city mencakup berbagai elemen yang menjadi dasar dalam mewujudkan kota yang layak huni. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Ketersediaan kebutuhan dasar yang mencakup perumahan layak, air bersih, jaringan listrik, sanitasi, dan ketercukupan pangan.

2. Ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti transportasi umum, taman, dan fasilitas kesehatan yang mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari.
3. Ketersediaan ruang publik sebagai wadah untuk berinteraksi antar komunitas dan memperkuat kohesi sosial.
4. Keamanan dan keselamatan (*security and safety*) yang menjamin perlindungan masyarakat dari ancaman kriminalitas maupun bencana.
5. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan kota, baik melalui forum formal maupun mekanisme konsultasi publik, sehingga warga dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
6. Dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan kebudayaan kota yang memungkinkan masyarakat mengembangkan potensi serta meningkatkan kualitas hidup.
7. Kualitas lingkungan yang meliputi kebersihan, pengelolaan sumber daya alam, dan keberlanjutan ekosistem kota.

Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan beberapa Sustainable Development Goals (SDGs) yang relevan, sehingga penerapannya diharapkan mampu menciptakan kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (IAP, 2023).

2.1.2.3 Indikator Livability

Indikator Livability dalam penelitian ini mengacu pada kerangka yang dikembangkan oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) melalui Most Livable City Index (MLCI) tahun 2022. MLCI digunakan untuk mengevaluasi kualitas hidup kota secara komprehensif dari perspektif warganya, mencakup aspek fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan (IAP, 2023).(IAP, 2023).

MLCI 2022 mengidentifikasi dua belas dimensi utama yang menjadi tolok ukur Livability, yaitu:

1. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar adalah pengukuran terhadap akses masyarakat terhadap air bersih, listrik, dan sistem sanitasi yang memadai untuk menunjang kehidupan sehari-hari (IAP, 2023)
2. Konektivitas dan mobilitas adalah penilaian terhadap kemudahan pergerakan masyarakat melalui transportasi umum yang efisien, aksesibilitas jalan, dan keterhubungan antar wilayah (IAP, 2023).
3. Ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) adalah evaluasi terhadap ketersediaan dan kualitas taman kota, alun-alun, serta fasilitas publik lainnya yang mendukung interaksi sosial dan kesejahteraan lingkungan (IAP, 2023).
4. Keamanan dan ketertiban adalah penilaian terhadap rasa aman masyarakat dari ancaman kriminalitas dan gangguan ketertiban umum, termasuk efektivitas aparat keamanan (IAP, 2023).
5. Kesehatan dan lingkungan adalah dimensi yang mencakup kualitas udara, pengelolaan sampah, pengendalian kebisingan, serta ketersediaan layanan

kesehatan (IAP, 2023).

6. Partisipasi dan inklusi sosial adalah penilaian terhadap sejauh mana warga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan publik dan memperoleh akses setara terhadap layanan kota tanpa diskriminasi (IAP, 2023).
7. Kualitas perumahan adalah penilaian terhadap kelayakan, kenyamanan, dan keterjangkauan harga tempat tinggal di suatu kota (IAP, 2023).
8. Pelayanan pendidikan adalah evaluasi terhadap ketersediaan sekolah dan kualitas pendidikan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat (IAP, 2023).
9. Pelayanan kesehatan adalah penilaian terhadap jumlah, distribusi, dan mutu fasilitas kesehatan yang tersedia bagi warga (IAP, 2023).
10. Kesempatan kerja adalah pengukuran terhadap ketersediaan lapangan kerja yang layak dan proporsional bagi penduduk usia produktif (IAP, 2023).
11. Keterjangkauan biaya hidup adalah perbandingan antara pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pokok dengan tingkat pendapatan masyarakat (IAP, 2023).
12. Kualitas tata kelola pemerintahan adalah penilaian terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (IAP, 2023).

Setiap dimensi tersebut diukur melalui lima belas kategori pengukuran *Livable Standards in Cities*, yaitu air bersih, listrik, sanitasi, perumahan, transportasi umum, konektivitas jalan, ruang terbuka hijau, fasilitas publik, keamanan

publik, penegakan hukum, kualitas udara, pengelolaan sampah, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan ketersediaan lapangan kerja (IAP, 2023).

Pendekatan MLCI menggabungkan data persepsi masyarakat yang diperoleh melalui survei dengan data sekunder dari berbagai instansi resmi. Hal ini memungkinkan penilaian Livability dilakukan secara komprehensif, meskipun tidak semua kota menjadi objek survei langsung (IAP, 2023).

Dalam penelitian ini, pengukuran Livability menggunakan skor Most Livable City Index (MLCI) tahun 2022 yang dipublikasikan oleh Ikatan Ahli Perencanaan pada tahun 2023. Skor MLCI dihitung berdasarkan gabungan data persepsi masyarakat melalui survei dan data sekunder dari berbagai instansi resmi. Nilai indeks berada pada rentang 0–100, di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kelayakhunian kota yang lebih baik.

2.1.3 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan variabel kondisi keuangan dan Livability kota:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil
1	Ritonga & Buanaputra (2022)	Developing rules of thumb for the financial conditions of city Livability: A study of municipal governments in Indonesia	Indikator kondisi keuangan (operational capacity, financial flexibility, komitmen to maintain services) yang signifikan berpengaruh terhadap Livability kota di Indonesia
2	Dwira Nirfalini Aulia (2016)	A Framework for Exploring Livable Community in Residential Environment. Case Study, Public Housing in Medan, Indonesia. Procedia Social and Behavioral Sciences.	Indikator kondisi keuangan seperti kapasitas operasional, fleksibilitas fiskal, dan komitmen pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Livability kota di Indonesia.
3	Garacea (2011)	Pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah di AS	Kapasitas fiskal yang tinggi meningkatkan kemampuan daerah untuk berinvestasi pada proyek-proyek kota berkelanjutan.
4	Smith (2008)	Hubungan keuangan daerah dengan kualitas infrastruktur	Menemukan bahwa belanja modal sangat dipengaruhi oleh kesehatan fiskal daerah

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil
5	Siregar (2019)	Analisis efektivitas anggaran daerah terhadap pelayanan public	Efektivitas penganggaran terkait langsung dengan kapasitas operasional daerah
6	Maulana (2021)	Kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menghadapi bencana	Kondisi keuangan sehat mendukung respon fiskal terhadap risiko tak terduga
7	Handayani (2022)	Indeks Livability kota-kota besar di Indonesia	Pengaruh indikator lingkungan dan sosial terhadap persepsi kualitas hidup masyarakat
8	Prasetya (2021)	Peran pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas hidup	Kebijakan fiskal yang efisien berdampak terhadap indeks kebahagiaan warga

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Kapasitas Operasional dengan Liability

Berdasarkan Public Finance Theory, kapasitas operasional mencerminkan efisiensi dan efektivitas pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya publik untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat secara berkelanjutan

(Musgrave, 1959). Sementara itu, Livability Theory memandang kapasitas operasional sebagai salah satu elemen penentu kelayakhunian kota, karena mempengaruhi ketersediaan dan kualitas layanan publik yang mendukung kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan warga (Pacione, 2003). Kapasitas operasional yang tinggi memungkinkan pemerintah memberikan pelayanan publik secara tepat sasaran, menjaga keberlanjutan infrastruktur, dan merespons kebutuhan warga secara efektif sehingga menciptakan lingkungan kota yang efisien, aman, dan mendukung kualitas hidup.

Penelitian terdahulu juga menguatkan hubungan ini, di mana kapasitas operasional yang memadai berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan (Zachariah et al., 2020), kota dengan kapasitas operasional tinggi cenderung lebih efisien dalam pelayanan publik seperti kesehatan dan transportasi (Setiawan et al., 2022), serta meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kualitas hidup dan kenyamanan kota (Ritonga & Buanaputra, 2022). Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik menurut Public Finance Theory dan selaras dengan Livability Theory yang menekankan kualitas layanan publik sebagai faktor utama kelayakhunian kota.

2.2.2 Hubungan Fleksibilitas Fiskal Livability

Menurut Public Finance Theory, fleksibilitas fiskal adalah kemampuan pemerintah menyesuaikan anggaran untuk menghadapi perubahan tanpa mengganggu layanan publik, mencerminkan fungsi stabilisasi fiskal (Musgrave, 1959). Dalam Livability Theory, fleksibilitas fiskal mendukung pemenuhan layanan publik dan infrastruktur yang menjadi pilar kelayakhunian kota (Pacione,

2003). Fleksibilitas fiskal yang baik memungkinkan pemerintah beradaptasi terhadap dinamika ekonomi, mengantisipasi kebutuhan mendesak, dan mempertahankan kualitas layanan bagi masyarakat tanpa menimbulkan tekanan fiskal jangka panjang.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa fleksibilitas fiskal yang tinggi memungkinkan pemerintah beradaptasi lebih cepat dengan perubahan ekonomi tanpa mengorbankan pelayanan publik (Wren-Lewis, 2006), meningkatkan aksesibilitas layanan, keadilan publik, dan keberlanjutan kota (Nakatani, 2025), serta mencerminkan tata kelola keuangan yang sehat dan kemampuan mengalokasikan sumber daya secara efisien (Zivkovic et al., 2014). Hal ini sejalan dengan fungsi stabilitas dalam Public Finance Theory dan selaras dengan Livability Theory yang menekankan pentingnya keberlanjutan layanan publik untuk menciptakan kota layak huni.

2.2.3 Hubungan Komitmen Mempertahankan Layanan dengan Livability

Dalam Public Finance Theory, pemerintah memiliki kewajiban menjaga kesinambungan penyediaan layanan publik melalui pengelolaan fiskal yang stabil (Musgrave, 1959). Berdasarkan Livability Theory, kontinuitas layanan publik seperti kesehatan, kebersihan, dan transportasi merupakan fondasi kelayakhunian kota (Pacione, 2003). Komitmen mempertahankan layanan memungkinkan warga mendapatkan akses yang konsisten terhadap fasilitas dan infrastruktur penting, serta menjaga kualitas hidup meskipun menghadapi tantangan ekonomi atau sosial.

Penelitian terdahulu mendukung pandangan ini, bahwa kota yang mampu mempertahankan layanan publik utama cenderung memiliki tingkat Livability yang

lebih stabil (Domingues et al., 2015), menunjukkan tata kelola keuangan yang disiplin dan berdampak pada persepsi kualitas hidup warga (Cárcaba et al., 2017), serta menjadikan keberlanjutan pelayanan publik sebagai faktor penting kenyamanan tinggal di tengah dinamika perkotaan (Iqbal, 2023). Hal ini sejalan dengan fungsi alokasi dalam Public Finance Theory dan selaras dengan Livability Theory yang menekankan pentingnya layanan publik berkelanjutan bagi kualitas hidup warga.

2.2.4 Hubungan Komitmen Meningkatkan Layanan dengan Livability

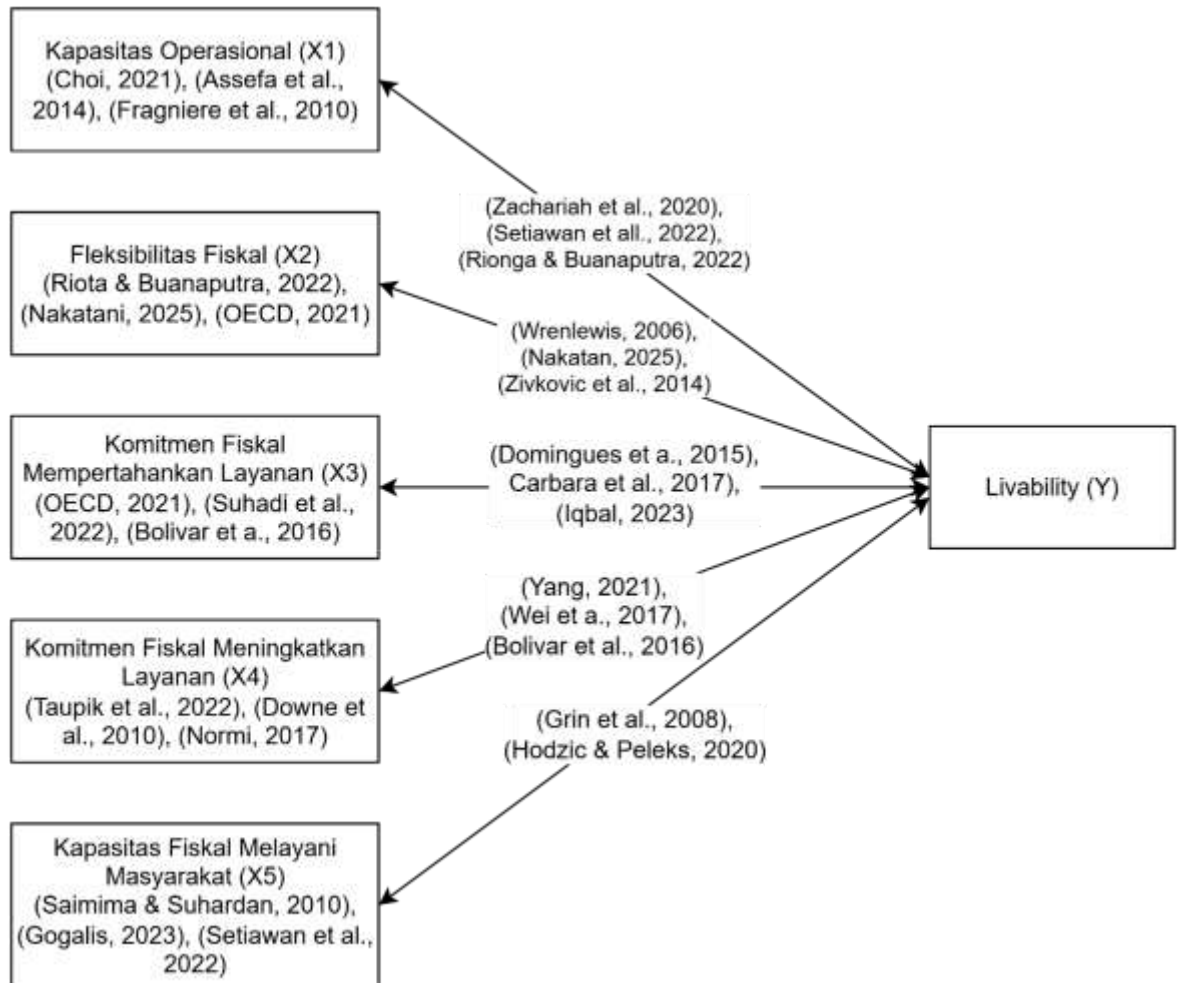
Public Finance Theory menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat (Musgrave, 1959). Sementara itu, Livability Theory menggarisbawahi bahwa peningkatan layanan publik, termasuk inovasi dan infrastruktur baru, berkontribusi pada kelayakhunian kotakota (Pacione, 2003). Upaya peningkatan layanan tidak hanya menjaga kualitas yang ada, tetapi juga memperluas manfaat bagi masyarakat melalui inovasi, perluasan akses, dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi maupun kebutuhan warga.

Penelitian terdahulu membuktikan bahwa kota dengan orientasi peningkatan layanan memiliki visi jangka panjang untuk meningkatkan Livability (Yang, 2021), perbaikan layanan publik secara konsisten berdampak pada persepsi positif masyarakat (Wei et al., 2017), dan peningkatan layanan memperkuat adaptabilitas kota terhadap perubahan kebutuhan (Bolívar et al., 2016). Hal ini sejalan dengan fungsi distribusi dalam Public Finance Theory dan selaras dengan Livability Theory yang menekankan pemerataan manfaat pembangunan demi meningkatkan kualitas hidup warga.

2.2.5 Hubungan Kapasitas Melayani Masyarakat dengan Livability

Dalam Public Finance Theory, kapasitas fiskal mencerminkan kemampuan pemerintah menyediakan layanan publik secara adil dan berkelanjutan (Musgrave, 1959). Menurut Livability Theory, kapasitas fiskal yang memadai menjadi syarat utama tercapainya kelayakhunian kota (Pacione, 2003). Kapasitas fiskal yang kuat memungkinkan pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur, menyediakan fasilitas umum berkualitas, dan merespons kebutuhan mendesak tanpa mengorbankan stabilitas keuangan jangka panjang.

Penelitian terdahulu menegaskan bahwa kapasitas fiskal yang kuat memungkinkan pemenuhan kebutuhan layanan secara efektif (Grin et al., 2018), memberi fleksibilitas pemerintah dalam memenuhi berbagai kebutuhan warga (Santiso, 2006), dan bahwa keterbatasan fiskal berdampak negatif pada kualitas hidup masyarakat (Ritonga & Buanaputra, 2022) serta menghambat penyediaan infrastruktur penting (Hossain, 2013). Hal ini sejalan dengan fungsi alokasi dan distribusi dalam Public Finance Theory dan selaras dengan Livability Theory yang menekankan pentingnya sumber daya memadai untuk mendukung kelayakhunian kota.



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran